

**PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN KAMPUNG TUA  
MELAYU NONGSA SEBAGAI PENUNJANG KAWASAN EKONOMI  
KHUSUS**

Fandy Iood\*, Dr. Ismael P Sinaga, M.Si  
Program Studi Magister Perencanaan Wilayah Universitas Batam  
email: [102620007@univbatam.ac.id](mailto:102620007@univbatam.ac.id), [mipsinaga@univbatam.ac.id](mailto:mipsinaga@univbatam.ac.id)

**ABSTRAK**

Pengembangan ekonomi kerakyatan adalah salah satu poin yang strategis dalam mewujudkan bangsa yang mandiri dan berdaya saing tinggi. Salah satu sektor pendukung ekonomi Indonesia adalah ekonomi kerakyatan tak terkecuali keberadaan provinsi kepri kota batam khususnya kampung tua melayu nongsa. Kota Batam yang dikhususkan menjadi salah satu daerah perekonomian dengan Kawasan ekonomi khusus menjadikan seluruh daerah kota batam termasuk kampung tua nongsa menjadi penunjang Kawasan ekonomi khusus. Saat ini Kawasan Kabil yang berbatasan dengan kampung tua nongsa telah ditetapkan menjadi Kawasan ekonomi khusus sehingga kampung tua nongsa diharapkan dapat memberikan kontribusi positif sebagai penunjang kebutuhan- kebutuhan yang bermanfaat baik dalam sektor ekonomi, social, budaya dan integrasi antar Kawasan ini dapat memberi peluang berkembang nya sektor ekonomi rakyat kampung tua nongsa dengan tetap mengutamakan kearifan lokal yang ada.

***Kata Kunci:*** *Ekonomi Kerakyatan, Ekonomi Khusus, Kampung Tua, Kearifan Lokal*

## **PENDAHULUAN**

Tahun 2022 ini adalah tahun pemulihan ekonomi pasca pandemic COVID19 yang diharapkan banyak pihak, selama 2 tahun terakhir masa pandemi badai ekonomi menghantam berbagai sektor tak terkecuali sektor ekonomi kerakyatan. Kebijakan Pemerintah Pusat melalui Presiden Ir. H. Joko Widodo telah melakukan langkah yang berani dan bijak dengan menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 67 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam Aero Technic dan Nomer 68 tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa, Kedua KEK tersebut berlokasi di kota Batam, Provinsi kepulauan Riau, Kedua KEK ini menjadi yang pertama di Batam, sehingga diharapkan dapat menjadi *Pilot Plan*, sebagai pengarah Kawasan ekonomi berbasis service dan digital yang dapat direplikasikan pada wilayah di Indonesia lainnya. Menyikapi peran dan fungsi KEK No 68 tahun 2021 tentang KEK Nongsa maka keberadaan wilayah Batasan tertentu yakni secara geoekonomi dan geostrategis, dalam keunikan KEK Nongsa dengan Wilayah batam yang juga merupakan Kawasan free Trade Zone Area. Pembentukan KEK guna meningkatkan integrasi dan produktivitas usaha dalam rangka memenuhi ekonomi global. Keberadaan KEK ini juga wajib membawa efek positif bagi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dikampung Tua Nongsa yang dalam Batasan wilayah berbatasan langsung dengan KEK Nongsa.gersang bagi mereka para pencari kerja.

Kawasan Nongsa yang berada dalam wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam perlu dikembangkan pada beberapa kegiatan usaha, terutama untuk mendorong pengembangan kegiatan riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi, pariwisata, pendidikan, dan industri kreatif serta kegiatan ekonomi lainnya yang sesuai dengan karakteristik wilayah Nongsa. Di samping itu kawasan Nongsa memiliki potensi dan keunggulan secara geoekonomi dan geostrategis. Pengembangan kawasan Nongsa tersebut akan dapat mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah transformasi ekonomi kota batam Provinsi Kepulauan Riau, serta untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional. Pengembangan kawasan Nongsa tersebut memerlukan fasilitas dan kemudahan yang meliputi perpajakan, kepabeanan dan cukai, lalu lintas barang, ketenagakerjaan, keimigrasian, pertanahan dan tata ruang, Perizinan Berusaha, dan/atau fasilitas dan kemudahan lainnya yang dalam fasilitas dan kemudahan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas belum memadai dan untuk itu diperlukan fasilitas dan kemudahan yang diatur dalam kawasan ekonomi khusus. Berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diatur bahwa Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun sebelum atau sesudah jangka waktu yang ditetapkan berakhir, dapat ditetapkan menjadi kawasan ekonomi khusus untuk sebagian atau seluruh kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, maka sebagian Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yaitu wilayah Nongsa diusulkan untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa. Keunggulan geoekonomi bertumpu pada lokasi geografis Kawasan Nongsa, Batam yang berdekatan dengan Bandar Udara Internasional Hang Nadim, dan telah tersedianya Pelabuhan Ferry Internasional Nongsapura di dalam kawasan, serta wilayah Nongsa yang berdekatan dengan negara Singapura dengan jarak tempuh

kurang dari satu jam dengan perjalanan menggunakan kapal ferry. Pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa telah memenuhi kriteria dan telah melengkapi persyaratan pengusulan pembentukan kawasan ekonomi khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Tujuan difokuskan pada kebutuhan infrastruktur pada wilayah kampung Tua Melayu, Nongsa dengan Sasaran Mendapatkan data lapangan infrastruktur Kampung Tua Melayu Nongsa, Batu Besar Kecamatan Nongsa, Kota Batam pada saat untuk dapat dilakukan perancangan sistem distribusi dengan fokus penggunaan dalam menopang KEK Nongsa. Optimalisasi Kearifan Lokal untuk Ekonomi Kerakyatan di Kampung Tua Nongsa dengan tujuan Memahami Pelayanan infrastruktur yang spesifik yang benar-benar dibutuhkan masyarakat pada Kawasan Kampung Melayu Batu Besar.

Potensi masyarakat untuk berperan serta membangun Kampung Tua Kampung Melayu, Nongsa menjadi Penyangga Ekonomi Kawasan Ekonomi Khusus. Salah satu teori yang umum tentang ekonomi kerakyatan yang kuat dan tangguh dalam menghadapi berbagai krisis Moneter dan Pandemi COVID19. Ini sebagai parameter kekuatan ekonomi yang sangat besar dalam bidang: industri kecil rumah tangga, pariwisata tradisional, kebudayaan Melayu lokal, pertanian tradisional, perikanan, nelayan tangkap dengan teknologi.

Kendala Utama Kampung Tua Nongsa RT/RW Rencana tata Ruang Wilayah:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah V (RTRW) 2004-2014 masa berlakunya telah habis sejak lima tahun lalu artinya selama 5 tahun kota Batam mengalami kekosongan RTRW. Tahap persetujuan DPRD (RTRW 2021-2024) apakah telah sesuai dengan Konsep KEK Nongsa sesuai PP No 68 Tahun 2021?
2. Penyatuan Visi dan Misi KEK NONGSA dengan Kawasan kampung Tua Nongsa sebagai Kearifan Lokal ekonomi kerakyatan dalam menopang Kawasan Ekonomi Khusus. Turunan Hukum PP No 68 tahun 2021 tentang KEK Nongsa masih membutuhkan petunjuk Teknis dan petunjuk Pelaksanaan oleh Dewan Kawasan.
3. Letak Geografis Kampung Tua Nongsa menjadi pertimbangan utama dalam memacu pembangunan KEK Nongsa.

Kendala lain yang dihadapi antara lain:

1. Peran Aktif Pemerintah Pusat dan Daerah dalam memetakan Zonasi Ekonomi Kerakyatan secara tegas dalam Konsep RTRW maupun KEK Nongsa.
2. Bantuan Dana Pembangunan infrastruktur Pedesaan/ Kota (PIK, KOTAKU, NUSP) dapat di alokasikan pada pembangunan pusat-pusat ekonomi kerakyatan seperti pembangunan Pasar rakyat, Tempat Penampungan Ikan & Cold Storage, Komoditi Lokal.
3. Kurangnya peran serta CSR dari perusahaan di sekitar Kawasan kampung Melayu

**Tinjauan Pustaka**

Kampung Tua berbatasan wilayah dengan KEK Nongsa Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Ekonomi Khusus Nongsa bahwa dalam rangka percepatan pengembangan wilayah di Pulau Batam untuk mendukung pengembangan ekonomi wilayah dan ekonomi nasional, perlu dikembangkan kawasan ekonomi khusus dan wilayah Nongsa di Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau telah memenuhi kriteria dan persyaratan untuk ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus.

Menurut International Labour Organization (ILO), pengertian ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi tradisional yang dilakukan masyarakat lokal untuk mempertahankan hidupnya. Masyarakat lokal di sini maksudnya adalah masyarakat dengan aktivitas ekonomi sederhana seperti pedagang kecil dan UMKM.

Dari sini dapat kita simpulkan bahwa pengertian ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Sejak sebelum kemerdekaan, ekonomi kerakyatan di Indonesia sudah diterapkan dan menjadi salah satu pilar perekonomian negara kita hingga sekarang Prinsip Ekonomi Kerakyatan di Indonesia Setelah membahas pengertian sistem ekonomi kerakyatan, selanjutnya kita akan membahas beberapa prinsip pelaksanaannya. Secara garis besar, ekonomi berbasis kerakyatan di Indonesia berlandaskan pada UUD 1945.

Ciri- ciri sistem Ekonomi Kerakyatan

Di antara sistem ekonomi lainnya, sistem ekonomi rakyat adalah salah satu sistem dengan karakteristik terunik. Selengkapny tentang ciri ciri sistem ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut:

1. Terbuka, setiap masyarakat punya hak dan akses sama terhadap sumber daya tersedia.
2. Berkelanjutan'tanpa mengorbankan masa depan masyarakat dan lingkungan.
3. Kegiatan ekonominya dilakukan secara mandiri dan fokus memenuhi kebutuhan diri dan sesama.
4. Mekanisme pasar berkeadilan dengan persaingan sehat.
5. Memprioritaskan kualitas hidup, kepentingan sosial, nilai-nilai keadilan, dan pertumbuhan ekonomi.
6. Pembangunan dilakukan secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan.
7. Masyarakat punya kesempatan sama untuk bekerja/membuka usaha demi kesejahteraannya.
8. Hak konsumen dilindungi dan diperlakukan dengan adil.

**Tujuan Ekonomi Rakyat**

Sistem ekonomi kerakyatan, berprinsip, dan bercirikan, meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat melalui potensi yang dimilikinya, sehingga secara nasional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Faktor Pendorong Ekonomi Kerakyatan di Indonesia. Penerapan sistem ekonomi rakyat mempunyai dampak positif yang luar biasa.

**Konsep Strategi Implementasi Infrastruktur.**

Implementasi infrastruktur mengangkat Ekopnomi Kerakyatan sebagai penopang Kawasan Ekonomi Khusus bagi masyarakat di Kampung Tua Melayu

## **Jurnal Potensi**

### **Program Studi Magister Perencanaan Wilayah Universitas Batam**

*Vol. 2 No. 1 Tahun 2022*

Nongsa, Batam dalam:

1. Keberadaan Kawasan kampung Tua Melayu Artefak social budaya Melayu telah dilindungi oleh kebijakan Walikota Batam melalui Perda Kampung Tua
2. Dari perbandingan dengan daerah lain seperti Jogja dan Bali, kearifan lokal itu adalah satu kekuatan ekonomi kerakyatan yang sangat besar.
3. Keberadaan Kawasan kampung Tua Melayu Artefak social budaya Melayu telah dilindungi oleh kebijakan Walikota Batam melalui Perda Kampung Tua
4. Dari perbandingan dengan daerah lain seperti Jogja dan Bali, kearifan lokal itu adalah satu kekuatan ekonomi kerakyatan yang sangat besar.
5. Ketika satu kawasan kampung tua dikembangkan secara khusus sesuai potensi wilayahnya, maka akan terjadi harmonisasi antara kearifan lokal Melayu terhadap pengembangan wilayah Kota Batam di 2 Kawasan Ekonomi Khusus lainnya'
6. Pembangunan infrastruktur yang ada saat ini dirasakan berjalan tanpa satu konsep pengembangan wilayah yang tidak terarahkan oleh Pemerintah Kota Batam, sehingga dapat menjadi 'Ikon Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang dapat dijadikan contoh untuk kawasan kawasan Kampung Tua/ hinterland di Kota Batam maupun Di Provinsi Kepulauan Riau.
7. Kearifan Lokal Melayu dapat terpelihara secara berkelanjutan seiring dengan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya, antara lain industri kerajinan, ekowisata dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

#### **1. Bagaimana Perkembangan Kampung Tua Nongsa dalam menopang KEK Nongsa?**

Dewan Nasional melakukan kajian terhadap usulan pembentukan KEK dalam jangka waktu paling lama 45 hari kerja sejak diterimanya dokumen usulan lengkap. Dewan Nasional melakukan evaluasi kebenaran prosedur pengusulan dan kelengkapan dokumen yang disampaikan. Dalam hal usulan pembentukan KEK memenuhi prosedur dan lengkap dokumen yang disampaikan, Dewan Nasional melakukan Kajian.

Berdasarkan hasil kajian, Dewan Nasional memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan KEK. Keputusan menyetujui dan menolak dilakukan dalam Sidang Dewan Nasional. Dalam hal Dewan Nasional menyetujui pembentukan KEK, Dewan Nasional mengajukan rekomendasi pembentukan KEK kepada Presiden disertai dengan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang penetapan suatu lokasi sebagai KEK. KEK yang telah ditetapkan harus siap beroperasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan. Dalam hal Dewan Nasional menolak usulan pembentukan KEK, penolakan disampaikan secara tertulis kepada pengusul disertai alasan.

#### **2. Bagaimana Pendapatan Masyarakat?**

Fasilitas perekonomian di Kecamatan Nongsa terlihat belum terlalu berkembang atau relatif masih kurang, hal ini dilihat masih sedikitnya pasar-pasar tradisional maupun belum terdapatnya pasar moderen di wilayah ini. Namun kebutuhan masyarakat akan sembako pada umumnya sudah bisa terpenuhi, dengan adanya pedagang-pedagang eceran dan agen perdagang kecil. Untuk memenuhi kebutuhan yang tidak ada dipasar tradisional atau kios masyarakat atau warga biasanya mengunjungi kecamatan lain yang masih bisa ditempuh dengan jarak

dekat Gudang penampungan ikan di kabil adalah termasuk gudang perikanan besar yang dikelola murni oleh pihak swasta, ikan-ikan ini disuplay ke pasar-pasar tradisional yang dijual oleh pedagang-pedagang kecil atau eceran. Persediaan ikan-ikan dari gudang-gudang di Punggur Nongsa ini cukup memenuhi kebutuhan akan ikan untuk masyarakat kota Batam pada umumnya.

Kecamatan Nongsa dikenal Sebagai pilar utama kegiatan perekonomian perikanan tangkap ataupun budidaya, yakni sebagai Pelabuhan Perikanan untuk kepentingan umum Jarak lokasi strategis berdekatan dengan pusat perkampungan nelayan pulau pulau di wilayah ini mempunyai peran untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitarnya. Aktifitas bongkar muat terjadi di Pelabuhan Tradisional Punggur Nongsa yang dikelola pihak swasta. Bertolak dari pada itu pada tanggal 08 Januari 2010, Menteri Kelautan dan Perikanan RI (Dr. Ir.H. Fadel Muhammad) berkunjung ke Pelabuhan Perikanan Swasta Telaga Punggur Batam. Pada saat itu juga Pelabuhan Perikanan Swasta Telaga Punggur Batam disahkan dan diresmikan sebagai Pelabuhan Perikanan yang dikelola oleh swasta di Propinsi Kepulauan Riau Indonesia bagian barat

### **3. Kondisi Aktifitas Ekonomi Kampung Tua Nongsa dan Kearifan Lokal/Tradisional**

Melihat mobilisasi dan aktifitas ekonomi kampung tua dapat dilihat dari beberapa parameter meliputi antara lain: jumlah tenaga kerja, jenis perdagangan, jumlah pengunjung, pelayanan pengunjung.

### **4. Permasalahan lahan dan batas wilayah Kampung Tua Nongsa.**

Perkembangan Permasalahan Pertanahan dan upaya penyelesaian dalam Penguasaan Tanah Perkampungan Tua. Upaya solusi atas permasalahan Tanah kampung tua dapat diselesaikan dengan baik melalui SK WAKO Batam No 105 Tahun 2004 tentang penentuan batas- batas area kampung tua yang mencapai luasan 90 Ha.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian mengumpulkan pendapat dari setiap pemangku kepentingan yang didapatkan dari data sekunder yaitu link internet, media cetak maupun online yang terpercaya. Peneliti juga melakukan studi literatur yang ada serta memperhatikan kesimpulan dari para peneliti yang terdahulu. Peneliti melakukan perbandingan pendapat-pendapat yang ada untuk kemudian dilakukan sebuah kesimpulan yang akan menjadi masukan solusi dalam permasalahan yang terjadi di Kampung Tua Nongsa Kota Batam.

### **Teknik Analisis Penelitian**

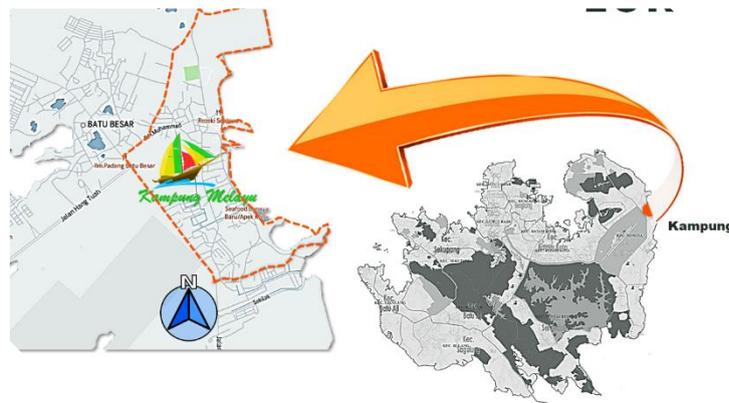
Teknik analisis yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, Teknis analisis diperlukan karena agar dapat menjawab rumusan masalah dan *research question* yang telah dirumuskan sebelumnya. Penjelasan teknik analisis akan disesuaikan dengan keempat sasaran yaitu Identifikasi masyarakat yang akan dibahas terkait lama tinggal, asal daerah dan jenis mata pencaharian masyarakat Kampung MELAYU di Kota Batam. Analisis yang akan digunakan menggunakan dua cara dengandeskriptif kualitatif .Analisis karakter fisik kampung dengan melihat penggunaan lahan, fungsi bangunan dan bentuk bangunan dengan menggunakan metode spasial dan deskriptif kualitatif,

Analisis aktivitas budaya dilihat dari :toponim, tradisi turun temurun, jenis aktivitas sosial budaya masyarakat; Kebutuhan data ditinjau dari aspek fisik meliputi bentuk bangunan dan keseimbangan konstruksi, selain itu ditinjau dari aspek non fisik meliputi jenis aktivitas budaya khas di Kampung MELAYU.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Kesenjangan kebijakan saat ini antara pemukiman kampung tua nongsa yang dijadikan berbatasan dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) maka Badan Pengelola dan Pemerintah daerah dalam hal pengembangan Kampung Tua menjadi penopang KEK wajib berkoordinasi antara Lembaga di pemerintah pusat dalam hal :

1. Peningkatan koordinasi antar lembaga terkait merupakan langkah utama yang perlu dilakukan segera
2. Kebijakan khusus dalam masalah penggunaan lahan, ketenagakerjaan dan investasi asing akan meningkatkan daya tarik bagi investasi asing di KEK



Gambar 1: Peta Lokasi Kampung Tua

Sehingga optimalisasi kearifan local untuk menopang ekonomi kerakyatan di kampung melayu Nongsa dengan tujuan memahami pelayanan infrastruktur yang spesifik yang benar-benar dibutuhkan masyarakat pada kawasan Kampung Melayu, Batu Besar.

Adapun Kebutuhan tersebut didefinisikan dalam 6 aspek yang berbeda pada pelayanan infrastruktur yaitu:

1. Pencapaian (Accessibility)
2. Kapasitas (Capacity)
3. Perubahan (Diversity)
4. Kualitas (Quality)
5. Kondisi (Condition)
6. Waktu (Time)

Keenam dimensi dari kebutuhan tersebut tidak dapat dipisahkan dari kesadaran akan adanya harga dan biaya. Tingginya biaya akan menunjukkan tingginya harga atau tingginya biaya untuk kelebihan pelayanan yang diperlukan



Gambar 2: Peta Kawasan kampung Melayu

Konsep strategi implementasi infrastruktur mengangkat ekonomi kerakyatan sebagai penopang Kawasan ekonomi khusus bagi masyarakat di kampung melayu Nongsa batam dengan beberapa cara yaitu:

1. Keberadaan Kawasan Kampung Melayu dengan artefak sosial budaya Melayu telah dilindungi oleh kebijakan Walikota Batam melalui Perda Kampung Tua
2. Dari perbandingan dengan daerah lain seperti Jogja dan Bali, kearifan lokal itu adalah satu kekuatan ekonomi kerakyatan yang sangat besar
3. Ketika satu kawasan dikembangkan secara khusus sesuai potensi wilayahnya, maka akan terjadi harmonisasi antara Kearifan Lokal Melayu terhadap pengembangan wilayah Kota Batam di 3 Kawasan Ekonomi Khusus lainnya' (Nongsa Digital Park, kemudian Maintenance Repair Overhaul (MRO) dan Aerocity di Bandara Hang Nadim). Dengan Demikian Kawasan Kmpung Melayu dapat dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus kerakyatan, dan diharapkan Pembangunan Kota Batam akan lebih mengampu pada kearifan lokal sehingga masyarakat Hinterland/ Kampung Tua pada umumnya dan Masyarakat kampung Melayu dapat berperan di pembangunan melalui Ekonomi Kerakyatan
4. Pembangunan infrastruktur yang ada saat ini dirasakan berjalan tanpa satu konsep pengembangan wilayah yang tidak terarahkan oleh Pemerintah Kota Batam, sehingga dapat menjadi 'Ikon Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang dapat dijadikan contoh untuk kawasan kawasan Kampung Tua/ hinterland di Kota Batam maupun Di Provinsi Kepulauan Riau.
5. Perlu adanya Pusat Kajian Kearifan Lokal Melayu, agar Kearifan Lokal Melayu dapat terpelihara secara berkelanjutan.



6. UU 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus [https://id.wikipedia.org/wiki/Kawasan\\_Perdagangan\\_Bebas\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kawasan_Perdagangan_Bebas_Indonesia), di unduh 11 februari 2022
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
8. Sidabutar Yuanita FD, E Indera, 2021, "Kajian Potensi Perencanaan Wilayah Kota Binjai Sumatera Utara", *Jurnal Potensi* vol 1 (1), hal 36-49
9. Sidabutar Yuanita FD, E. Indera, 2021, "Maritime Potential Phenomenon in improving the Welfare of the Riau Island Community", *E3S Web of Conferences* 324 (MaCIFIC 2021), 08001
10. Sidabutar Yuanita FD, J Danuwidjojo, F Iood, 2021, "Kearifan lokal melayu sebagai identitas Kota Batam" *Jurnal Potensi* 1 (2), 22-28
11. Sidabutar Yuanita FD, 2020, "The effect of building quality and environmental conditions on community participation in medan city historical buildings", *Vol 5 NO 1 (2020): JURNAL IDEALOG* (<https://doi.org/10.25124/idealog.v5i1.28>)
12. Sidabutar Yuanita FD, 2021, "Kearifan Lokal Dalam Perencanaan Wilayah",
13. Sidabutar Yuanita FD, 2021, "Ilmu Perencanaan Wilayah untuk Membangun Kepulauan Riau", <https://batampos.id/2021/03/08/ilmu-perencanaan-wilayah-untuk-membangun-kepulauan-riau/>)
14. Sidabutar Yuanita FD, 2021, "Dasar-dasar perencanaan wilayah", PT Tiga Saudara Husada, ISBN 978-623-98846-0-4, cetakan pertama, November 2021.